

PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI DESA DAYAH KEURAKO TAHUN 2009 HINGGA SEKARANG

Nurul Fazilah¹

¹Pendidikan Sejarah, Universitas Jabal Ghafur, Indonesia

*Corresponding author: Nurulfazilah303@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the role of women in village development through the Family Welfare Empowerment (PKK) program in Dayah Keurako Village, Pidie Regency. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through direct observation and document analysis to gain an in-depth understanding of how women participate as subjects, not merely objects, in development. The findings indicate that although women have historically been marginalized due to patriarchal cultural norms, gender mainstreaming policies have begun to open space for more active female participation. In Dayah Keurako, the PKK organization serves as a crucial platform for women to engage in various sectors such as health, education, economy, and socio-cultural activities. Progressive leadership such as that demonstrated by PKK chairwoman Nadariana has significantly improved the quality and involvement of female cadres. However, internal challenges such as the dual roles of women and lack of self-confidence remain obstacles. This study recommends enhancing training, promoting gender equality, and strengthening the capacity of village women to better position them as drivers of development.

Keywords: *women, village development, PKK, gender, women's participation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran perempuan dalam pembangunan desa melalui kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Dayah Keurako, Kabupaten Pidie. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi langsung dan studi dokumenter untuk memahami secara mendalam bagaimana perempuan terlibat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara historis perempuan sering kali termarginalkan dalam pembangunan akibat budaya patriarki, kebijakan pengurus utama gender mulai membuka ruang bagi partisipasi aktif perempuan. Di Desa Dayah Keurako, keberadaan PKK menjadi wadah penting bagi perempuan untuk berperan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga sosial budaya. Kepemimpinan yang progresif, seperti yang dilakukan oleh Ketua PKK Nadariana, turut mendorong peningkatan kualitas dan keterlibatan kader perempuan secara signifikan. Namun, beberapa hambatan internal seperti peran ganda perempuan dan rendahnya kepercayaan diri masih menjadi tantangan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pembinaan, sosialisasi kesetaraan gender, dan penguatan kapasitas perempuan desa agar lebih siap menjadi motor penggerak pembangunan.

Kata Kunci: perempuan, pembangunan desa, PKK, gender, partisipasi perempuan

1. Pendahuluan

Pada zaman yang Sudah maju ini, perempuan bebas melakukan apa saja tanpa belenggu seperti masa lalu, seperti keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, di dalam masyarakat, bahkan dalam pembangunan desa, dalam keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, perempuan tidak bisa luput dari berbagai sudut pandang yang menyertainya. Bisa jadi orang-orang menilai perempuan berdasarkan ciri cirinya, perannya dalam keluarga, masyarakat, pendidikan, dll. Adapun perempuan menurut pandangan sejarah memiliki banyak peran, diantaranya peran profesional terdiri dari peran perempuan sebagai politisi, perempuan sebagai sopir bus way, dan perempuan sebagai kuli bangunan. Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia dan negara berkembang pada umumnya, peranan perempuan memang dipandang terlambat dalam dunia politik. Salah satu permasalahannya adalah masih sedikitnya jumlah perempuan yang memegang jabatan public (Koniherawati & Pratikno, 2020).

Keadaan peran dan status perempuan saat ini dipengaruhi oleh masa lampau, kultur, ideologi, dan praktik hidup sehari-hari, inilah yang menjadi kunci mengapa keterlibatan perempuan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara mengalami kelemahan. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik inilah yang mendorong dan melatarbelakangi lahirnya berbagai macam tuntutan agar perempuan lebih diberi ruang dalam berpartisipasi. Secara internasional, penguatan peran perempuan dalam dunia dapat dilihat pada tuntutan internasional yang terdapat dalam milenium Development gilas (MDGS) yang harus dipenuhi pada 2015 sebagai bagian pencapaian kemajuan bangsa. Deklarasi ini berpijak pada pemenuhan hak-hak dasar manusia antara lain yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, meningkatkan kesehatan ibu, dan membangun kerja sama global untuk pembangunan Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tertindas dan tersisihkan. Seperti yang diucapkan oleh Vivekananda bahwa negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan menjadi besar saat ini maupun di masa depan. Sehingga pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari perempuan dalam segala bidang kehidupan. Peran perempuan telah di akomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional dalam UU No. 6 tahun 2015 tentang desa, yang menyajikan. Keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa (Susanto, 2018).

Pidie merupakan salah satu kabupaten di provinsi Aceh, salah satu desa yang berada di kabupaten Pidie kecamatan Indra Jaya adalah Desa Dayah Keurako yang menjadi lokasi penelitian ini, keberadaan perempuan di Desa Dayah Keurako kebanyakan hanya diposisikan dalam bidang-bidang yang melibatkan perempuan saja, artinya perempuan hanya diposisikan di bidang khusus seperti PKK dalam pemberdayaan keluarga, di Desa Dayah Keurako sangat sedikit keterlibatan perempuan dalam menduduki jabatan-jabatan di Desa Dayah Keurako dan kurang dalam aparatur desa, oleh karena itu hal ini menarik untuk dikaji agar ditemukan akar permasalahannya.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi deskriptif analitis. mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada keterlibatan secara langsung peneliti untuk mendapatkan kebenaran dari realitas dalam penelitian, kegiatan ini biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung dan studi dokumenter. Untuk proses analisis data peneliti melakukan teknik deskriptif kualitatif. Tulisan deskriptif dibentuk untuk mendapatkan informasi tentang gejala saat penelitian dilakukan (Anggito & Setiawan, 2018).

3. Hasil dan Pembahasan

Manusia dengan kelengkapannya, menunjukkan adanya suatu kodrat dari Tuhan yang harus diterima. Leo Tolstoy, seorang novelis dan filsuf dari Rusia telah membuat suatu sintesa dari perbandingannya dengan pemikir yang lain untuk mencari eksistensi yang dimiliki manusia, khususnya pada wanita. Perbincangan mengenai historiografi sejarah perempuan, tidak bisa dilepaskan dari pasang surut pemahaman feminisme itu sendiri dalam rentang sejarah. Feminisme bukan hanya sebuah gerakan, termasuk juga ke dalam alat analisis sosial. Hanya saja dalam sejarah perempuan, kata feminisme menjadi kata “momok” yang menakutkan karena feminisme dianggap hantu yang membahayakan, dianggap sebagai musuh baik di ranah ideologi maupun gerakan. Bahkan para perempuan saat ini, berdasarkan survei meski setuju dengan akses perempuan terhadap pendidikan, kesetaraan di berbagai bidang, mendorong perempuan maju tetapi mereka enggan disebut feminis (Iriansyah, 2017).

Program kesetaraan dan keadilan gender ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengurus utama Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan menjadikan gender sebagai arus utama dalam pembangunan, dan ditegaskan lagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005–2009. Pelaksanaan Pengurus utama Gender (PUG) diinstruksikan kepada seluruh Departemen maupun Lembaga Pemerintah dan non-Departemen di Pemerintah Nasional, Provinsi maupun di Kabupaten/kota, untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan, kebutuhan, aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program/proyek dan kegiatan (Indarti, 2019).

Pembangunan merupakan isu penting yang tidak pernah berhenti dibahas baik di negara terbelakang, negara berkembang, sampai dengan negara maju. Walaupun konteks yang dibicarakan dan cara yang digunakan mereka berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya tujuan yang diharapkan semua sama, yakni membawa negaranya masing-masing dari keadaan sebenarnya saat ini menuju keadaan normatif yang dianggap lebih baik. Posisi perempuan dalam pembangunan

memang seharusnya ditempatkan sebagai partisipan atau subjek pembangunan bukan sebagai objek sebagaimana yang terjadi selama ini.

Realitas menunjukkan bahwa posisi perempuan masih sebagai objek pembangunan, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, masih kuatnya faktor sosial dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang beda; kedua, masih banyak perundang-undangan, kebijakan dan program pembangunan yang belum peka gender; ketiga, kurang adanya sosialisasi ketentuan hukum yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan secara menyeluruh; keempat, belum adanya kesadaran gender di kalangan para perencana dan pengambil keputusan; kelima, belum lengkapnya data pilah yang memaparkan posisi perempuan dan laki-laki secara jelas dalam bidang pembangunan di semua departemen; keenam, belum maksimalnya kesadaran, kemauan dan konsistensi perempuan itu sendiri dan; ketujuh, kurangnya pengetahuan perempuan terhadap tujuan dan arah pembangunan, sehingga perempuan kurang respons, masa bodoh atau menolak secara tidak langsung dari program-program pembangunan (M.Rasyid et al., 2024).

Melalui kebijakan yang mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana yang diusung oleh konsep GAD, maka setiap pelaksanaan program selalu menggunakan indikator-indikator atau pertimbangan-pertimbangan keseimbangan peran dan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu, pembangunan dalam konteks pendekatan ini harus mencakup tiga nilai, yang meliputi Ketahanan (Sustenance) kemampuan memenuhi kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup. Harga diri (Self esteem): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia. Freedom from servitude: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam kegiatan pembangunan, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam perannya di bidang perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan maupun menikmati hasilnya. Perempuan dan laki-laki secara bersama-sama sekaligus menjadi objek dan subjek pembangunan. Partisipasi perempuan dalam pembangunan adalah berperan aktifnya mereka dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan memperoleh hasil atau risiko dari keseluruhan tindakan yang berkait dengan upaya pembangunan yang dilaksanakan. Dalam pengelolaan pembangunan, partisipasi perempuan adalah peran serta perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelestarian pembangunan. Partisipasi perempuan dalam pengelolaan pembangunan bisa dinilai rendah atau tinggi, sempit atau luas, dengan melihat seberapa jenis peran yang dilakukan masyarakat dibanding dengan peran orang luar. Tingkat partisipasi perempuan pada program pembangunan yang satu dan yang lain bisa berbeda atau sama. Tingkat partisipasi perempuan pada tahap-tahap pengelolaan pembangunan tidak selalu sama. Bisa terjadi “rendah” tingkat partisipasinya pada tahap peranan, “tinggi” pada tahap pelaksanaan, dan “sedang” pada tahap pengendalian dan evaluasi (Fitriana, 2014).

Gerakan PKK bertujuan untuk menunjang pembangunan dan keahlian dalam berorganisasi khususnya di Kabupaten Pidie, dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ada di pedesaan khususnya Desa Dayah Keurako Kabupaten Pidie. Pemerintah Kabupaten Dayah Keurako pada umumnya sangat mendukung

adanya Gerakan PKK dan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan juga dilaksanakan oleh pihak PKK di Desa Dayah Keurako.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu organisasi yang di bawah struktur pemerintah desa Dayah Keurako, PKK Desa Dayah Keurako menjadi tempat para wanita sebagai pelopor penggerak pembangunan yang diwadahi melalui PKK. PKK terdiri dari 10 program pokok yaitu Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga, Pendidikan dan keterampilan, Kesehatan, Mengembangkan hidup berkoperasi, Kelestarian lingkungan hidup, Perencanaan sehat

Kepengurusan PKK periode 2021–2027 dalam mengembangkan 10 Program PKK dan dalam pengelolaan posyandu melibatkan peran dan fungsi kader-kader PKK, dan para kader PKK khususnya dasa wisma telah mempunyai seperangkat instrumen pendataan yang sangat erat dengan pendataan profil posyandu. Instrumen pendataan yang dimaksud adalah catatan yang ada di tingkat kelompok dasa wisma, catatan tersebut meliputi data-data tentang data keluarga, data kegiatan warga, dan data rekapitulasi ibu hamil, melahirkan, ibu meninggal, dan kelahiran balita.

Posyandu yang melibatkan kader-kader PKK di Desa Dayah Keurako dilaksanakan setiap sebulan sekali. Kader-kader PKK memiliki tugas masing-masing pada saat posyandu, ada yang membagikan makanan yang mengandung protein tinggi untuk setiap anak atau ibu hamil, bagian pendataan, dan lain-lain. Mereka sangat antusias dalam menjalankan tugas tersebut. Adapun tugas lain dari ibu PKK yaitu pada bagian pemenuhan kebutuhan sandang. Di Desa Dayah Keurako tersedia fasilitas berupa pecah belah yang digunakan pada saat ada acara di dalam desa tersebut. Peran ibu PKK yaitu mendata jumlah pecah belah yang dipinjam oleh masyarakat, dan menyusun kembali secara teratur.

Pada tahun 2009, yaitu pada saat ditetapkannya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2009 tentang Pemerintah Aceh yang telah memberikan kesempatan untuk keterwakilan perempuan 30% dalam berbagai segi pembangunan di Aceh, namun meskipun telah ditetapkan, pada tahun 2009–2017 keterlibatan perempuan di Desa Dayah Keurako masih sangat kurang dan ibu PKK juga kurang memperhatikan dan kurang memberikan binaan terhadap para kader. Sehingga program PKK tidak ada perkembangan sama sekali.

Dengan ditetapkannya ibu Nadariana sebagai ketua PKK, program PKK di Dayah Keurako untuk menunjang pembangunan dan keahlian dalam berorganisasi terus berkembang dan semakin membaik. Para kader yang dipilih oleh ibu Nadariana dan para masyarakat merupakan wanita–wanita yang memiliki kualitas dan kemampuan di bidang masing-masing. Ibu Nadariana juga sangat baik dalam membina dan mengarahkan para kader.

Tidak hanya dalam segi pembangunan, perempuan di Desa Dayah Keurako juga berpartisipasi dalam bidang sosial masyarakat, dalam bidang adat dan lingkungan. Adapun faktor-faktor yang menjadi peran perempuan dalam pembangunan desa di Desa Dayah Keurako seperti dari faktor internal: peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan wanita karier. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan peran ganda perempuan dalam pembangunan desa, faktor internal meliputi: peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan wanita karier, pandangan masyarakat yang meragukan kemampuan perempuan dalam memimpin, pendidikan, pengalaman.

Terdapat beberapa program yang dapat digunakan sebagai perencanaan pembangunan pedesaan di Desa Dayah Keurako salah satunya adalah pembentukan program PKK. Kegiatan PKK menjadi sebuah daya tarik bagi masyarakat terutama di masa saat ini. Adanya kesempatan

ini, dapat dijadikan sebagai peluang bagi beberapa daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan ke dalam kegiatan desa. Kekayaan alam yang ada di beberapa daerah yang ada di Indonesia dapat di jadikan oleh masyarakat untuk membangun Desa Dayah Keurako. Konsep Desa Dayah Keurako sendiri merupakan salah satu bentuk wujud pembangunan PKK dengan model pembentukan kebersamaan. Pembentukan kebersamaan dengan menyajikan bahan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan. Suasana di desa membutuhkan bahan PKK untuk kebutuhan acara seperti Syukuran, perkawinan, pengajian (Djumati et al., 2015).

Ketua PKK sering kali memberikan dan membantu dalam hal pembinaan (Pendidikan dan Pelatihan) di dalam kegiatan-kegiatan PKK selama ini seperti Kegiatan Pertemuan Rutin yang memang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mengenai di dalam hal keagamaan dan kerohanian mereka sendiri dan juga mengadakan pendidikan atau pelatihan mengenal apa itu Posyandu kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk memberikan stabilitas bahwa pentingnya dilakukan posyandu setiap bulan mengikuti Posyandu bagi anak-anak balita sampai umur 5 tahun karena di dalam posyandu bisa mengecek kestabilan anak-anak bisa mengecek bisa perkembangan berat badan anak dan program imunisasi (Wahyu & Handini, 2022).

Keberadaan perempuan dalam pembangunan pasca pemerintah meluncurkan Dana. Desa menjadi topik kajian penulis dalam meneliti lebih jauh untuk mengetahui keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Gampong Dayah Keurako Kecamatan Indra Jaya menjadi lokasi penelitian karena gampong ini pernah menjadi salah satu Gampong di pemukiman Lhok Kaju. Dalam bidang pendidikan ditetapkan sebagai gampong sadar pendidikan yang memiliki Sekolah Dasar (SD) sendiri yang dibangun dengan swadaya sendiri yang hari ini sudah banyak prestasi yang diraih, sekolah ini dipimpin oleh seorang wanita. Dalam hal pengelolaan pemberdayaan bagi masyarakat dan Gampong Dayah Keurako dengan BUMGnya ditetapkan sebagai BUMDesa Terbaik kategori partisipatif oleh Pemerintah Pusat, peran ini tidak terlepas dari peranan kaum ibu-ibu yang mengelola aset gampong yang membawa income sebagai pendapatan asli gampong (Nova, 2022).

4. Simpulan dan Saran

Perbincangan mengenai historiografi sejarah perempuan, tidak bisa dilepaskan dari pasang surut pemahaman feminisme itu sendiri dalam rentang sejarah. Feminism bukan hanya sebuah Gerakan termasuk juga ke dalam alat analisis sosial. Hanya saja dalam sejarah perempuan kata feminisme menjadi kata “momok” yang menakutkan karena feminisme dianggap hantu yang membahayakan, dianggap sebagai musuh baik di ranah ideologi maupun Gerakan. Bahkan para perempuan saat ini, berdasarkan survey meski setuju dengan akses perempuan terhadap Pendidikan, kesetaraan di berbagai bidang, mendorong perempuan maju tetapi mereka enggan disebut feminisme. Posisi perempuan dalam pembangunan memang seharusnya ditempatkan sebagai partisipan atau subjek pembangunan bukan sebagai objek sebagaimana yang terjadi selama ini. Realitas menunjukkan bahwa posisi perempuan masih sebagai objek pembangunan, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, masih kuatnya faktor sosial dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang beda; kedua, masih banyak perundang-undangan, kebijakan dan program pembangunan yang belum peka gender; ketiga,

kurang adanya sosialisasi ketentuan hukum yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan secara menyeluruh; keempat, belum adanya kesadaran gender di kalangan para perencana dan pengambil keputusan; kelima, belum lengkapnya data pilah yang memaparkan posisi perempuan dan laki-laki secara jelas dalam bidang pembangunan di semua departemen; keenam, belum maksimalnya kesadaran, kemauan dan konsistensi perempuan itu sendiri dan; ketujuh, kurangnya pengetahuan perempuan terhadap tujuan dan arah pembangunan, sehingga perempuan kurang respon, masa bodoh atau menolak secara tidak langsung dari program-program pembangunan.

Daftar Pustaka

- Anggito,A, & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian Kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Djumati, H., Rompas, W. Y., & Rorong, A. J. (2015). Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kao Utara Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(10), 14.
- Fitriana, R. (2014).Perkembangan Gerakan Politik Perempuan di Indonesia. *Procedia Manufacturing*, 1(22 Jan), 1–17.
- Indarti, S. H. (2019). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v5i1.1650>
- Iriansyah, H. S. (2017). Tantangan dan Peluang Perempuan dalam Berpolitik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 8(2), 1–14. <http://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/jip/article/view/23>
- Koniherawati, & Pratikno, P. (2020). Peran Perempuan Dalam Merumah. *ATRIUM Jurnal Arsitektur*, 1(1), 49–60. <https://doi.org/10.21460/atrium.v1i1.37>
- M.Rasyid, Kasful Anwar US, & Sya'roni Sya'roni. (2024). Peran dan Pengaruh Pendidikan Islam pada Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Serta Tokoh-Tokohnya. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(5), 276–283. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.560>
- Nova, M. A. (2022). Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa (Studi Femenisme dan Gender Pada Perempuan Desa Blang KruengKabupaten Aceh Besar). *Jurnal Al-Ukhwah*, 1(1), 1–13. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/ukhwah/article/view/1126>
- Susanto, A. (2018). Jurnal Kajian Gender dan Anak. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak Vol.*, 02(2), 147–170.
- Wahyu, T., & Handini, R. (2022). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa di Desa Wisata Lontar Sewu Selama Masa Pandemi. *Jurnal Paradigma*, 11(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/49229/40936>